

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang penulisan Tugas Akhir**

Akuntansi merupakan kegiatan yang mencakup pencatatan, pelaporan, peringkasan, dan penganalisisan data keuangan. Menurut (Mohamadi, 2023) Sistem Akuntansi adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Standar Akuntansi tersebut sebagai alat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi keuangan sampai pada pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. SAP tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) yang dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat (1) penerapan SAP dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas menuju Akruwal menjadi penerapan SAP Berbasis Akruwal. Terdapat beberapa ciri-ciri dari sistem akuntansi pemerintahan meliputi:

1. **Transparansi**, dimana informasi yang diberikan harus mudah dipahami oleh masyarakat maupun pihak yang berkepentingan.
2. **Akuntabilitas**, yang memungkinkan pemerintah daerah dapat bertanggung jawab dengan aktivitas keuangannya.

3. Keberlanjutan, sistem yang menyediakan informasi yang tidak labil atau konsisten. Yang artinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaannya terjadi secara terus menerus.

Selain itu, ada beberapa komponen utama dalam sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu pencatatan transaksi termasuk transaksi keuangan maupun non-keuangan, pelaporan keuangan secara akurat dan komprehensif, anggaran dan perencanaan, pengendalian internal yang menerapkan prosedur pengendalian yang efektif agar terhindar dari kesalahan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi sehingga sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku, dan peningkatan kinerja guna mengevaluasi kinerja keuangan.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah yaitu tentang bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangannya. Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang melibatkan beberapa aspek antara lain pendapatan dan penerimaan, pengeluaran dan belanja, manajemen aset dan liabilitas, laporan keuangan, kepatuhan dan akuntabilitas, serta kondisi keuangan dalam jangka panjang. Segala aktivitas dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas terkait kinerja laporan keuangan baik arus kas masuk maupun arus kas keluar harus memiliki hak dan tanggung jawab.

Pemerintah wajib membuat laporan keuangan yang berkualitas. Apabila terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, dapat menimbulkan dampak yang buruk. Salah satunya kepercayaan terhadap penyajian laporan keuangan yang dapat menimbulkan keputusan yang buruk.

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, dan peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Adapun tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah dengan membuat laporan kinerja selama satu tahun anggaran.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dibuat untuk melaporkan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan. Kebijakan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem yang dipakai BPKAD kota Yogyakarta untuk melaporkan akuntansi keuangannya menggunakan SIPKD. SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem yang digunakan daerah untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjurnal pelaporan keuangan. Selain itu, terdapat sistem lain yang digunakan yaitu SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Kemendag RI. SIPD tersebut digunakan mulai pada saat perencanaan hingga akhir pelaporan. Akan tetapi SIPD yang dimiliki belum sempurna.

Berdasarkan pernyataan yang penulis sampaikan, untuk mengetahui penerapan prosedur akuntansi yang diterapkan di BPKAD Kota Yogyakarta yang berpengaruh pada laporan APBD tahun 2023. Akhirnya, dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan dalam tugas akhir yang berjudul:

**“PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SIPKD TERHADAP LAPORAN DI BPKAD KOTA YOGYAKARTA YANG BERPENGARUH PADA APBD TAHUN 2022 - 2023”**

## **1.2. Cakupan pembahasan**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis jabarkan, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam. Pembahasan tersebut mencakup berbagai informasi terkait sistem akuntansi yang digunakan dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah yang memiliki pengaruh terhadap aplikasi akuntansi pada BPKAD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, cakupan pembahasan Tugas Akhir adalah:

- a. Bagaimana penerapan sistem akuntansi SIPKD terhadap laporan keuangan pada BPKAD kota Yogyakarta?
- b. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD kota Yogyakarta?

## **1.3. Tujuan dan manfaat penulisan Tugas Akhir**

Tujuan Penulisan Tugas Akhir:

- a. Dapat menjelaskan bagaimana penerapan sistem laporan keuangan di BPKAD kota Yogyakarta.
- b. Dapat membuktikan seberapa pengaruh sistem akuntansi SIPKD terhadap laporan keuangan.

Manfaat Penulisan Tugas Akhir:

- a. Untuk mengetahui sistem akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pada BPKAD kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem yang baik dalam menyusun laporan keuangan pada BPKAD kota Yogyakarta.
- c. Untuk menambah wawasan terhadap kualitas laporan keuangan antara tahun 2022 sampai 2023.
- d. Sebagai referensi dan menambah wawasan kepada pembaca.